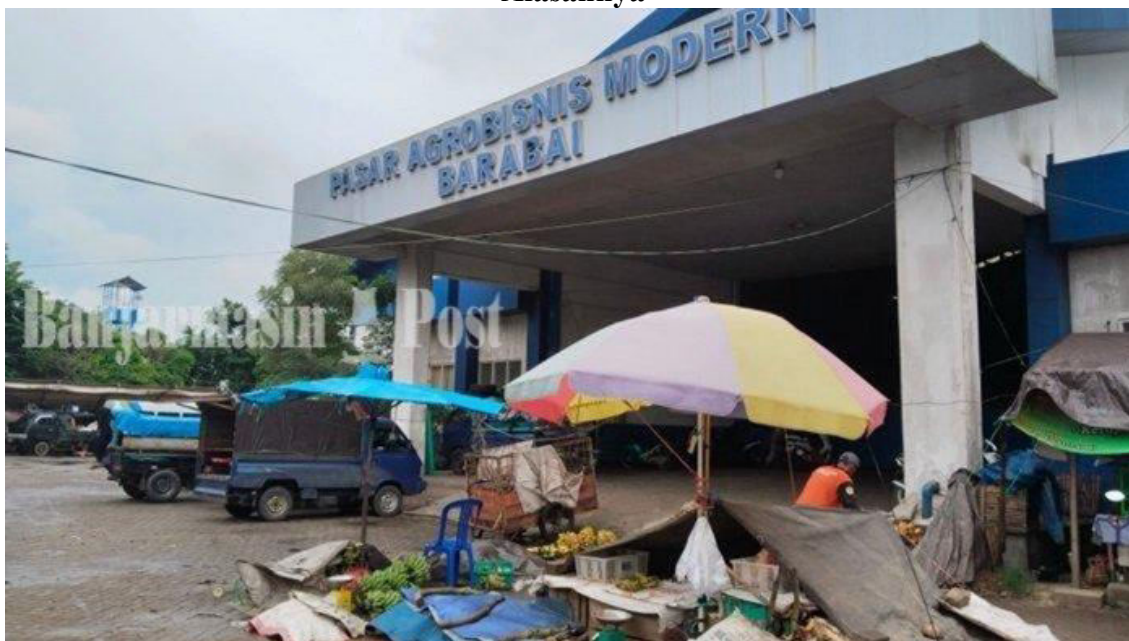


Pengelolaan Pasar dan Pangan di Hulu Sungai Tengah Bakal Diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah, Dinas Perdagangan Hulu Sungai Tengah Beberkan Alasannya



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Kondisi-pasar-agrobisnis-Barabai-Kabupaten-HST.jpg>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Dinas Perdagangan HST bakal menyerahkan pengelolaan pasar dan pengendalian pangan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Informasi diterima Banjarmasinpost.co.id, Senin, (13/05/2024), BUMD tersebut rencananya akan segera dibentuk dengan dua tujuan utama yakni pengelolaan pasar agar lebih profesional dan pengendalian inflasi dari sektor pangan.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) HST, Irfan Sunarko mengatakan, prosesnya tengah berjalan. Dari segi Payung hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan BUMD tersebut pun sedang digodok.

"Manfaanya banyak. Diantaranya pengelolaan pasar lebih efektif dan profesional," Jelasnya. Irfan mengatakan hal itu dilakukan karena dinas perdagangan ini ruang lingkupnya terbatas, banyak yang diurus tidak cuma pasar. "Sementara itu, dari sektor pangan, juga sangat memudahkan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas di pasar dan menekan inflasi, " Jelasnya.

Ia mengatakan contohnya jika harga beras naik, BUMD ini bisa langsung beli dan stok beras. Kemudian dijual dengan harga murah. "Kehadiran BUMD ini diharapkan masalah-masalah klasik di Pasar Keramat dan Agrobisnis Barabai bisa teratasi. Khususnya dalam menangani masalah pangan. Selain itu, kerjanya juga lebih fleksibel dibandingkan dinas di Pemkab, " Jelasnya.

Ia mengatakan BUMD ini juga disebut nantinya akan berdampak positif, karena dapat membuka lapangan kerja. “Semoga, perda ini nanti disetujui oleh DPRD. Mudah-mudahan, tahun ini bisa langsung beroperasi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD HST, Rachmadi saat dikonfirmasi mengakui merestui pembentukan BUMD tersebut. “Sudah disampaikan dalam rekomendasi laporan pertanggungjawaban Pemkab HST Tahun 2023 lewat rapat paripurna DPRD HST awal bulan Mei 2024 lalu,” jelasnya. Ia pun berharap segera terealisasi.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) berencana menyerahkan pengelolaan pasar dan pengendalian pangan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tersebut rencananya akan segera dibentuk. Ada dua tujuan utama dari pembentukan BUMD itu, yakni pengelolaan pasar agar lebih profesional dan pengendalian inflasi dari sektor pangan.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) HST, Irfan Sunarko mengatakan, saat ini prosesnya tengah berjalan. Payung hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan BUMD tersebut sedang digodok. “Tujuan pengelolaan pasar melalui BUMD agar lebih efektif dan profesional. Kami sudah pasti banyak keterbatasan, karena tidak cuma pasar yang diurus,” ujarnya, belum lama tadi.

Kemudian, dalam sektor pangan lewat BUMD ini juga dapat memudahkan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas di pasar dan menekan inflasi. “Misalnya harga beras lagi naik, BUMD ini bisa langsung beli dan stok beras. Kemudian dijual dengan harga murah,” paparnya.

Irfan menambahkan, kehadiran BUMD ini diharapkan masalah-masalah klasik di Pasar Keramat dan Agrobisnis Barabai berharap bisa diatasi. Dalam menangani masalah pangan, kerjanya juga lebih fleksibel dibandingkan dinas di Pemkab. BUMD ini juga disebut nantinya akan berdampak positif, bisa membuka lapangan pekerjaan. “Semoga, perda ini nanti disetujui oleh DPRD. Mudah-mudahan, tahun ini bisa langsung beroperasi,” harapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga tengah bersiap jika rencana ini terealisasi akan cepat merespons dengan segera membuat organisasi kerja berkaitan dengan direksi dan jajarannya. Ia meyakini, BUMD ini nantinya akan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah dengan memiliki saham mayoritas sebagai landasan. Meski tak menutup kemungkinan, investor dari luar dapat bergabung. “Keinginan kami, BUMD ini hadir bukan sekadar memikirkan keuntungan, tetapi turut serta membangun HST,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD HST, Rachmadi menambahkan, pihaknya telah merestui pembentukan BUMD tersebut. Hal itu juga sudah disampaikan pihaknya

dalam rekomendasi laporan pertanggungjawaban Pemkab HST Tahun 2023 lewat rapat paripurna DPRD HST awal bulan Mei 2024 tadi. “Semoga dapat segera terealisasi. Mengingat, peran penting dan strategis badan ini dalam stabilisasi harga pangan nantinya,” tutupnya.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/13/pengelolaan-pasar-dan-pangan-di-hst-bakal-diserahkan-ke-bumd-disdag-hst-beberkan-alasannya>, Pengelolaan Pasar dan Pangan di Hulu Sungai Tengah Bakal Diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah, Dinas Perdagangan Hulu Sungai Tengah Beberkan Alasannya, (13/05/2024).
2. <https://pojokbanua.com/pengelolaan-pasar-dan-pangan-di-hst-bakal-diserahkan-ke-bumd-ada-apa/>, Pengelolaan Pasar dan Pangan di Hulu Sungai Tengah Bakal Diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah, Ada Apa? (12/05/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:

- 1) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah (Pasal 1 angka 1);
- 2) Daerah dapat mendirikan BUMD.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

BUMD terdiri atas:

- a. perusahaan umum Daerah; dan
- b. perusahaan perseroan Daerah.

Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal 4)

- 3) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%o (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. (Pasal 5).